**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGAL**

Jl Raya Dukuhtunggal Nomor : 01 Telp. 081230220090 kode Pos 62292

**LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DUKUHTUNGGAL
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012**

**DESA DUKUHTUNGGAL
KECAMATAN GLAGAH KABUPATEN LAMONGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGAL

Jl.Raya Dukuhtunggal No.01 Desa Dukuhtunggal Tlp. 081230220090 Kode Pos 62292

LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA DUKUHTUNGAL
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

*Yth. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Beserta Anggota
Hadirin-Hadirat Yang Saya Hormati*

Segala puja dan puji tersanjungkan keharibaan Allah Swt. Yang senantiasa mengalirkan rahmat-Nya kepada kita bersama, sehingga pada hari ini dapat hadir dalam rangka penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Tahun Anggaran 2012 dalam keadaan sehat wal afiat . Amin.

Selanjutnya sholawat ta'dhim Allah semoga senantiasa tersandingkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Yang telah mengantarkan kita dengan cahaya keimanan menuju kebenaran yang hakiki, berupa Ad-Dinul Islam sebagai satu-satunya harapan masa depan dalam mencapai kenikmatan surgawi yang kekal nan abadi.

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Maka pada kesempatan ini perkenankanlah saya menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran kepada Rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi , meliputi keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan desa, termasuk Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selama satu tahun anggaran.

Kami menyadari bahwa didalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa selama Tahun Anggaran 2012, masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Hal ini tidak terlepas karena keterbatasan kami dalam memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa ini.

Selanjutnya kami sangat mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik dari Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa maupun seluruh elemen masyarakat untuk melengkapi sekaligus menyempurnakan kekurangan dan keterbatasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun Anggaran 2012 agar menjadi lebih baik pada Tahun Anggaran berikutnya.

Oleh karena itu atas nama Pemerintah Desa pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Lembaga Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa serta seluruh warga Masyarakat Desa Dukuhtunggal atas partisipasi dan dukungannya, sekaligus menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada warga masyarakat Desa Dukuhtunggal melalui Badan Permusyawaratan Desa dalam rapat paripurna ini. Dan tak lupa kami mohon do'a restu serta dukungannya, semoga Allah Swt. senantiasa memberikan kekuatan dan hidayah-Nya, sehingga dapat memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang lebih baik pada Tahun Anggaran berikutnya.

Adapun untuk melengkapi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Dukuhtunggal pada Akhir Tahun Anggaran 2012, tersusun sebagai berikut :

Kata Pengantar

Bab I : Pendahuluan

- A .Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C . Gambaran Umum Desa

Bab II : Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dan Program Pembangunan Tahun Anggaran 2012

- A . Bidang Pemerintahan
- B. Bidang Ekonomi Dan Pembangunan
- C. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban
- D. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Bab III : Pelaksanaan Kebijakan Program Dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Tahun Anggaran 2012.

- A. Pelaksanaan Kebijakan Program Dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- B. Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes.) Tahun Anggaran 2012

Bab IV : Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Hambatan Dan Upaya Penyelesaian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saudara Ketua Dan BPD, Serta Hadirin Yang Berbahagia

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dimana dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.

Saudara Ketua Dan Anggota BPD, Serta Hadirin Yang Berbahagia

Sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, kami dalam menjalankan roda pemerintahan senantiasa berpijak pada kerangka program yang termuat dalam RKPDes, Program Kerja Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan hasil Musernbangdes, dimana dalam penyelenggaraannya tertuang Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes.) serta tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan situasi dan kondisi yang bersifat mendasar yang mengharuskan kami mengambil langkah kebijakan yang tentunya setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan meminta pertimbangan kepada BPD selaku mitra kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankanlah kami menyampaikan evaluasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kami selama melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada tahun Anggaran 2012.

B. Dasar Hukum

Saudara Ketua Dan Anggota BPD Serta Hadirin Yang Berbahagia

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa ini disusun mengacu pada aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemerintah Desa, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Desa
2. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor :09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Pemerintahan Desa.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes.)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor :17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa.
9. Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
10. Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor : 01 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
11. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 188/02/Kep/413.322.06/2012 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2013

C. Gambaran Umum Desa

1. Kondisi Geografis

a. Luas Wilayah Desa Dukuhtunggal 363,37 ha. Terdiri dari :

❖ Sawah Tambak	: 338,3	ha.
❖ Tegal/Tanah Kering	: -	ha.
❖ Pekarangan	: 15,7	ha
❖ Perkebunan	: -	ha
❖ Lain-lain	: 10,0	ha

b. Batas Wilayah.

❖ Sebelah Utara	: Desa Wedoro
❖ Sebelah Timur	: Desa Tanggul rejo Manyar, Gresik
❖ Sebelah Selatan	: Desa Meluntur
❖ Sebelah Barat	: Desa Bapuh bandung

c. Struktur Wilayah

Desa Dukuhtunggal terdiri dari :

- ❖ 2 (lima) Dusun
- ❖ 3 (dua) Rukun warga
- ❖ 8 (Enam) Rukun tetangga

2. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk Desa : 2.566 Jiwa,terdiri dari :

- ❖ Laki-laki : 1.316 jiwa.
- ❖ Perempuan : 1250 jiwa
- ❖ Kepala Keluarga : 625 KK

b. Tingkat Pendidikan

- ❖ Tidak Tamat SD/Sederajat : 167 orang
- ❖ Tamat SD/Sederajat : 200 orang
- ❖ Tamat SLTP/Sederajat : 521 orang
- ❖ Tamat SLTA/Sederajat : 360 orang
- ❖ Perguruan Tinggi : 57 orang

c. Mata Pencaharian

- ❖ Petani : 624 orang
- ❖ PNS/TNI/POLRI : 30 orang
- ❖ Wiraswasta : 212 orang
- ❖ Buruh tani : 75 orang
- ❖ Pengusaha : 27 orang
- ❖ Pengrajin : 24 orang
- ❖ Peternak : 18 orang

BAB II

KEBIJAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Saudara Ketua Dan Anggota BPD Serta Hadirin Yang Kami Hormati

Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor : 09 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 05 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka seluruh kebijaksanaan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing seksi yang penjabarannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Bidang Pemerintahan

Melaksanakan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pengendalian dan pemberian bimbingan yang meliputi :

- a. Produk-produk hukum Pemerintahan Desa
- b. Kependudukan Dan Catatan Sipil
- c. Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- d. Pertanahan
- e. Politik, Ideologi Negara, Kesatuan Bangsa, Organisasi Sosial, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
- f. Perpajakan, Retribusi dan Pendapatan Desa;
- g. Penerangan, Komunikasi dan Informasi;
- h. Perijinan Pelayanan Umum Bidang Pemerintahan

B. Bidang Ekonomi Pembangunan

Melaksanakan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan yang meliputi :

- a. Industri dan perdagangan;
- b. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- d. Perbankan dan perkreditan rakyat
- e. Perikanan, kelautan dan peternakan
- f. Pekerjaan umum, pertambangan, energi serta lingkungan hidup;
- g. Perhubungan, pariwisata, pos dan telekomunikasi;
- h. Perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan dan evaluasi hasil pembangunan desa;
- i. Perijinan dan pelayanan umum bidang perekonomian dan pembangunan

C. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban

Melaksanakan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan yang meliputi :

- a. Pembinaan dan penertiban perijinan
- b. Penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
- c. Kegiatan perlindungan masyarakat dan penyelamatan penanggulangan bencana
- d. Kegiatan lain dibidang ketentraman dan ketertiban

D. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Melaksanakan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinmasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan yang meliputi :

- a. Pendidikan, pemuda, olah raga, kebudayaan, dan adat istiadat
- b. Kesehatan dan Keluarga Berencana
- c. Sosial, keagamaan, partisipasi dan swadaya masyarakat
- d. Perijinan dan pelayanan umum bidang kesejahteraan masyarakat

E. Bidang Pemberdayaan Perempuan

Melaksanakan tugas operasional dan administrasi perumusan kebijaksanaan teknis, koordinmasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan yang meliputi :

- a. Pemberdayaan perempuan
- b. Keluarga Berencana
- c. Kesetaraan martabat, kedudukan, keadilan gender, hak asasi dan kelembagaan yang mendukung kemajuan perempuan

Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana tersebut diatas, ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa Dukuhtunggal melalui Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2012 dengan mempertimbangkan keterbatasan dan kemampuan desa, sehingga dalam menetapkan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa menggunakan Pola minimal.

Secara global seluruh kebijaksanaan, program dan pelaksanaannya terangkum dalam evaluasi Program Kerja Pemerintahan Desa (terlampir)

BAB III
PELAKSANAAN KEBIJAKSANAAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Saudara Ketua Dan Anggota BPD Serta Hadirin Yang Kami Hormati

Sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor : 01 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2012, maka kebijaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa telah disusun program kegiatan yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Kebijakan, Program Dan Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Bidang Pemerintahan

a. Produk Hukum Pemerintahan Desa

Untuk mendukung kelancaran proses penyelenggaraan pemerintahan Desa agar dapat berjalan lancar, efektif dan berdaya guna, maka perlu adanya perangkat hukum sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menyusun produk hokum pemerintahan desa, baik berupa Peraturan Desa maupun Keputusan Kepala Desa.

Pada tahun anggaran 2012 ada beberapa produk hukum yang telah disahkan, yang terdiri dari :

1. Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang R-DAPBDes Tahun 2013
2. Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
3. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Program Kerja Tahunan Desa
4. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 04 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan tahun 2013
5. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 05 Tahun 2012 tentang Susunan Tata Organisasi pemerintahan Desa Tahun 2012
6. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 06 Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Penyususun RKP-Desa

7. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 07 Tahun 2012 tentang Penetapan Tim Delegasi Desa dalam MUSRENBANG DES Kecamatan

8. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 08 Tahun 2012 tentang penetapan TPU (Tim penggali Usulan Desa) Program PNPM-MP

9. Keputusan Kepala Desa Dukuhtunggal Nomor : 09 Tahun 2012 tentang penetapan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) Program PNPM-MP

a. Aparatur Pemerintah

Sebagaimana dimaklumi bahwa Sesuai dengan Peraturan Desa Dukuhtunggal Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Dukuhtunggal Menggunakan pola minimal, dimana dalam pola ini Struktur Pemerintah Desa Dukuhtunggal Seharusnya terdiri dari : Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Perokonomian Dan Pembangunan, Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Kepala Dusun-Kepala Dusun.

Meskipun demikian, pada kenyataannya sampai dengan Pertengahan tahun anggaran 2012, jumlah personil aparatur Pemerintah Desa Dukuhtunggal belum dapat dilengkapi, karena masih terdapat kekosongan jabatan, yaitu jabatan Kepala Urusan Keuangan dan Kepala Dusun Pedurungan. Kekosongan jabatan tersebut telah diisi pada sekitar bulan Agustus Tahun 2012

Data Aparatur Pemerintah Desa Dukuhtunggal

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	ZAKARIYA	Kepala Desa	
2	MUSTAIN,S.Ag	Sekretaris Desa	
3	AGUS KURNIAWAN	Kaur Umum	
4	IKROM	Kasi Pemerintahan	
5	M.AS'AD	Kasi Kesra	
6	ALI Wafa	Kasi EK-BANG	
7	Drs. NURKHOLIS	Kasun Dukuh	
8	ABD MUIN	Kasun Pedurungan	
9	ALI SYAFI'IN	Kaur Keuangan	

Jajajaran aparat Pemerintah Desa Dukuhtunggal secara keseluruhan masih tergolong dalam usia produktif, sehingga masih mampu bekerja secara optimal dalam menjalankan tugas-tugas, baik tugas pelayanan maupun penggerak pembangunan desa.

a. Kependudukan Dan Pelayanan Masyarakat

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dibidang kependudukan, Pemerintah Desa telah melakukan langkah-langkah :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya status dan identitas kependudukan yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akte Kelahiran dengan harapan agar tumbuh kesadaran bahwa pada hakekatnya kepemilikan identitas kependudukan tersebut untuk kepentingan mereka sendiri. Sosialisasi tersebut dilakukan secara rutin dalam berbagai kesempatan, baik dalam Rapat Kerja Perangkat Desa, Rapat Dusun, Rapat RT, maupun dalam forum yang lain.
2. Menginstruksikan kepada Kepala Dusun untuk melaporkan keadaan penduduk setiap bulan di wilayah kerjanya masing-masing.
3. Melaporkan Rekapitulasi keadaan penduduk ke Kecamatan setiap bulan.
4. Melakukan Coklit Kependudukan

Dalam hal pelayanan masyarakat, kami selalu menekankan kepada seluruh aparat pemerintah Desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya dengan sistem cepat, tanggap dan akurat.

Selanjutnya setiap jenis layanan dicatat dalam Buku Register sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Politik

2. Bidang Ekonomi Pembangunan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pemerintah Desa merupakan unsur Pemerintahan terendah dalam ketatanegaraan kita. Namun pada kenyataannya Pemerintah Desa memikul beban yang paling berat, karena bersinggungan secara langsung dengan masyarakat yang dipimpinnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tuntutan masyarakat, sehingga menjadikan problematika yang dihadapi semakin kompleks. Apalagi pada awal tahun 2012 Desa Dukuhtunggal termasuk diantara sekian desa di wilayah Kabupaten Lamongan yang mengalami cuaca ekstrim yakni

hujan sepanjang tahun, akibatnya terjadi perubahan pola tanam yang berdampak terhadap hasil produksi

Untuk menjawab semua persoalan yang timbul, Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikannya dengan melakukan pembenahan/pembangunan sarana prasarana di berbagai sektor, yang meliputi :

a. Sektor Pertanian

Adapaun untuk memenuhi kebutuhan petani, Pemerintah Desa berusaha memenuhi kebutuhan petani melalui program-program sebagai berikut :

1. Pengadaan bantuan bibit melalui program SLPTT
2. Mengatur pendistribusian pupuk bersubsidi kepada para petani melalui Kelompok Tani untuk memenuhi kebutuhan petani.
3. Mengembangkan pinjaman modal kepada petani melalui program Pengembangan Usaha Agribis Pedesaan (PUAP)
4. normalisasi saluran irigasi
5. Pembersihan enceng gondok di sepanjang anak sungai yang berada di wilayah desa Dukuhtunggal melalui program Padat Karya
6. Pembangunan Jembatan Pertanian
7. Pembangunan TPT Saluran Irigasi

b. Sektor Perhubungan/Transportasi

Pemerintah Desa melalui Bantuan Pemerintah Kabupaten yang berupa ADD dan BANSUN, BKD Propinsi serta ditunjang Swadaya Masyarakat telah berhasil mewujudkan program pembangunan, sebagai berikut :

1. Pembangunan Jembatan Rt 003 Rw 001 dusun Pedurungan
2. Pembangunan Jembatan Pertanian / Makam Dusun Pedurungan
3. Pembangunan Jembatan Pertanian Dusun Pedurungan

3. Bidang Ketentraman Dan Ketertiban

Pada bidang ini sesuai tugas dan fungsinya, telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pembinaan dan penertiban perijinan
2. Penegakan Peraturan Desa dan perundang-undangan lainnya
3. Penanggulangan dan pelaporan tidak kejahatan dan kriminalitas

4. Bidang Kesejahteraan Masyarakat

Bidang Kesejahteraan masyarakat merupakan bidang yang paling banyak mendapatkan tuntutan dari masyarakat, karena berkaitan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat. Oleh karena itu kegiatannya dibagi menjadi beberapa sektor, yaitu :

a. Sektor Sosial

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masyarakat Desa Dukuhtunggal tergolong masyarakat menengah kebawah. Oleh karena itu Pemerintah Desa sebagai kepanjangan tangan dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat telah melaksanakan program-program pemerintah meliputi:

1. Mendistribusikan paket RASKIN (beras untuk masyarakat miskin) setiap bulan sekali kepada masyarakat
2. Mengusahakan bantuan untuk Rumah tidak layak huni
3. Mengajukan pinjaman modal usaha kecil bagi RTM melalui Program SPP PNPM Mandiri Pedesaan.

b. Sektor Agama

Masyarakat Desa Dukuhtunggal termasuk masyarakat yang agamis, artinya setiap langkah hidupnya selalu menkedepankan pertimbangan moral. Oleh karena itu diperlukan bentuk bentuk kegiatan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai moral yang meliputi :

1. Memberikan motivasi dan dukungan sepenuhnya terhadap kegiatan-kegiatan keagamaan
2. Bersama-sama masyarakat melakukan penataan dan pengembangan sarana peribadatan (Masjid/Musholah), melalui gerakan swadaya dan amal jariyah.
3. Meningkatkan dan menanamkan kepada masyarakat semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathoniyah
4. Menggerakkan semangat gotong royong dan kebersamaan dibidang sosial keagamaan

c. Sektor Pendidikan

Seiring dengan semangat warga masyarakat terhadap dunia pendidikan, Pemerintah Desa memberikan motivasi dukungan sepenuhnya untuk mengembangkan dunia pendidikan di Desa Dukuhtunggal, baik pendidikan Formal maupun Non Formal. baik lembaga pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah maupun Lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat.

Secara rinci Desa Dukuhtunggal telah memiliki 1(satu) unit sekolah Negeri, yaitu SDN Dukuhtunggal dan 5 (Lima) unit Sekolah swasta, yaitu : 2 Unit MI, 2 Unit TK/PAUD dan 1 Unit MTs

Sedangkan untuk Lembaga Pendidikan Non Formal, di Desa Dukuhtunggal telah berdiri 3 TPQ dan beberapa kelompok belajar Alquran yang masih menggunakan metode lama. Hal ini menunjukkan betapa besar semangat mereka didalam mengembangkan lembaga pendidikan di desa Dukuhtunggal ini, sehingga menjadikan suatu kebanggaan bagi Pemerintah Desa sekaligus menjadi suatu kewajiban untuk mendukung dan mengembangkannya.

d. Sektor Kepemudaan

Kami menyadari bahwa sepanjang tahun 2012 gaung Karang Taruna Desa Dukuhtunggal kurang terdengar, karena kebiasaan rutin kegiatan dalam rangka memperingati HUT RI 17 Agustus 1945 pada tahun ini tidak diadakan seperti tahun-tahun sebelumnya, hal ini disebabkan karena peringatan HUT RI bertepatan pada bulan Ramadhan. Meskipun demikian bukan berarti Karang Taruna pada tahun 2012 ini tidak melakukan kegiatan sama sekali, sebab pada 2012 tercatat ada beberapa kegiatan :

1. Mengirimkan kontingen untuk mengikuti beberapa perlombaan di tingkat Kecamatan dalam rangka memperingati HUT RI ke 69
2. Mengirim Tim dalam rangka Turnamen Futsal Bungah Cub di Bungah Gresik

e. Sektor Kesehatan

Pada Sektor ini Pemerintah Desa berkerjasama dengan Bidan Desa dan Puskesmas telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengadakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat
2. Megadakan kegiatan Posyandu sebulan sekali
3. Mengadakan imunisasi secara rutin kepada BALITA.
4. Memberikan pelayanan kesehatan melalui PUSTU
5. Pengadaan Sumber Air Bersih

Meskipun demikian tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan Desa Dukuhtunggal masih jauh dari kategori lingkungan sehat. Hal ini terbukti masih banyaknya tempat-tempat genangan air baik pada musim penghujan maupun pada musim kemarau yang dapat dijadikan tempat bersarangnya bibit-bibit penyakit, terutama nyamuk penyebab timbulnya penyakit DBD.

Selanjutnya persoalan lain yang timbul dalam hal pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin adalah tidak terakomodirnya seluruh masyarakat yang masuk kategori masyarakat miskin oleh Pemerintah, sehingga tidak semua masyarakat miskin Desa Dukuhtunggal mendapatkan pelayanan kesehatan melalui JAMKESMAS, sedangkan Data Askeskin Desa Dukuhtunggal prosentasenya sangat kecil dan tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Pada tahun 2012 ini telah dilakukan verifikasi data JAMKESMAS dan JAMKESDA Kabupaten Lamongan yang semoga saja semakin banyak Masyarakat Desa Dukuhtunggal yang bisa terlayani.

f. Sektor Pemberdayaan Perempuan

Pada Sektor ini Pemerintah Desa telah memiliki organisasi Kemasyarakatan bagi kaum perempuan yakni PKK. Melalui organisasi ini mereka mengadakan kegiatan secara rutin baik melalui PKK Desa, PKK Tingkat Kelompok Dusun, PKK Tingkat Kelompok RT sampai tingkat kelompok Dasawisma.

Kami menyadari bahwa pos-pos kegiatan POKJA Tim Penggerak PKK, mulai dari POKJA I sampai dengan POKJA IV belum dapat berjalan secara optimal dan seimbang. Pada tahun-tahun mendatang kami akan berupaya untuk melakukan penataan dan pembinaan agar kegiatan Tim Penggerak PKK Desa Dukuhtunggal lebih meningkat volume kegiatannya.

B. Perhitungan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2012

Sebagai bagian dari rangkaian Laporan Pertanggungjawaban akhir tahun anggaran 2012, maka perlu kiranya kami sampaikan bahwa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun 2012 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Desa Nomor: 01 Tahun 2012 tentang APBDesa telah memuat Anggaran sebesar Rp. 720.700.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Penerimaan sebesar Rp. 720.700.000,-
2. Belanja Sebesar Rp. 720.700.000,-

Pada kenyataannya Anggaran Pendapatan Desa Tahun 2012 dapat mencapai realisasi sebagai berikut :

1.Penerimaan dari target sebesar Rp. 720.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 720.700.000,-

2.Belanja sebesar Rp. 720.700.000,- terealisasi sebesar Rp. 720.700.000,- Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai seluruh target yang direncanakan dan realisasinya, maka penjelasan yang dapat kami sampaikan seperti berikut ini :

1.Sisi Penerimaan

Sebagaimana dijelaskan dari rencana Anggaran yang ditargetkan sebesar Rp. 720.700.000,- pada kenyataannya mencapai realisasi sebesar Rp. 720.700.000,- atau dapat mencapai target 100% yang secara rinci dapat dilihat di lampiran 1 Laporan Pertanggungjawaban akhir Tahun Anggaran 2012.

2. Sisi Belanja

Pada sisi pengeluaran baik Belanja Rutin maupun Belanja Pembangunan dari Rencana Anggaran yang disediakan sebesar Rp. 720.700.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 720.700.000,- dan rincian lebih jelas dapat dilihat pada lampiran II dan III Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran ini.

Dengan demikian dapat diketahui dari realisasi Penerimaan sebesar Rp. 720.700.000,- dan dimanfaatkan untuk belanja rutin dan belanja Pembangunan sebesar Rp Rp. 720.700.000,- maka sisa Anggaran adalah Rp. 0,-

BAB IV

P E N U T U P

Sdr. Ketua Dan Anggota BPD serta hadirin yang kami hormati

Sebelum mengakhiri laporan kami, maka perkenankanlah kami sampaikan :

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Desa telah berupaya secara maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan segala keterbatasan yang dimilikinya dari berbagai bidang, mulai dari bidang Pemerintahan, ekonomi pembangunan, keamanan dan ketertiban sampai dengan bidang sosial kemasyarakatan. Keterbatasan dimaksud meliputi keterbatasan fasilitas administrasi pemerintahan, keterbatasan dana, sampai dengan keterbatasan jumlah aparatur pemerintah.
2. Pemerintah Desa dalam menjalankan program pembangunan di desa, meskipun telah memiliki acuan yang berupa Peraturan Desa (Perdes) yang mengatur tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes), tetapi tidak menutup kemungkinan untuk melakukan langkah-langkah kebijakan yang tidak tertuang dalam Perdes maupaun hasil Musrenbangdes yang diusulkan kepada pemerintah Kabupaten melalui Pemerintah Kecamatan. Hal ini terjadi manakala ada peluang dan kesempatan yang amat disayangkan jika tidak dimanfaatkan.

B. Hambatan-Hambatan

Selama perjalanan pemerintahan satu tahun anggaran, Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas dan kewenagannya, ternyata belum dapat melaksanakan seluruh program dengan sempurna. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

1. Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, namun hasilnya belum optimal. Hal ini diantaranya disebabkan oleh sebagian langkah dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Kabupaten kurang sesuai dengan realitas masyarakat yang dihadapi Pemerintah Desa.
2. Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) yang secara teoritis menjadi acuan Pemerintah Kabupaten dalam pengalokasian Dana Pembangunan pada tahun anggaran berikutnya ternyata belum memenuhi harapan. Sehingga pada akhirnya harus pandai-pandai mencari trobosan melalui berbagai upaya untuk memperoleh dana bantuan yang telah diprogramkan.

C. Harapan Dan Upaya Penyelesaian

Untuk mengatasi beberapa hambatan yang ada, kami selaku pimpinan penyelenggara Pemerintahan Desa megarapkan :

1. Adanya langkah-langkah kebijakan dari Pemerintah Kabupaten untuk melakukan langkah-langkah obyektif, sehingga kekurangsesuaian kebijakan Pemerintah dengan realitas di masyarakat dapat diminimalisir. Dengan demikian Pemerintah Desa dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan baik.
2. Adanya Konsistensi dari Pemerintah Kabupaten terhadap Program pembangunan desa yang harus didasarkan pada hasil Musrenbangdes yang ditindaklanjuti melalui Musrenbangcam dan diputuskan dalam Musrenbangkab dengan menitikberatkan pada skala prioritas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing desa, sehingga aspek keadilan dan pemerataan benar-benar dapat dijunjung tinggi.

Saudara Ketua Dan Anggota BPD Serta Hadirin Yang Kami Hormati

Demikian keseluruhan uraian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang dapat kami sampaikan dan dengan segala kerendahan hati kami menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Lembaga Desa dan seluruh warga masyarakat Desa Dukuhtunggal atas segala partisipasi dan dukungannya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan pada tahun anggaran 2012 ini.

Kami menyadari bahwa apa yang kami lakukan belum dapat memenuhi harapan seluruh masyarakat Desa Dukuhtunggal. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. kami berharap seraya memohon petunjuk-Nya semoga pada tahun-tahun mendatang kami dapat melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan lebih baik, sehingga menjadikan masyarakat Desa Dukuhtunggal lebih maju dan sejahtera. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dukuhtunggal, 27 Februari 2013

Kepala Desa Dukuhtunggal

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN GLAGAH
DESA DUKUHTUNGGAL

Jl.Raya Dukuhtunggal No.01 Desa Dukuhtunggal Tlp. 081230220090 Kode Pos 62292

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH
KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA RAPAT MEMBAHAS LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2012
Nomor : 027/02/ 413.322.06 / 2013

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Februari Tahun Dua Ribu Tiga belas, bertempat di Balai Desa Dukuhtunggal Kecamatan Glagah Kabupaten Lamongan, telah mengikuti dan memberikan penilaian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Dukuhtunggal Akhir Tahun Anggaran 2012

Demikian Berita Acara Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa Dukuhtunggal Tahun Anggaran 2012 ini dibuat sebagai bentuk Tugas dan tanggung jawab Kepala Desa Dukuhtunggal.

Badan Permusyawaratan Desa
Dukuhtunggal

1. H.THUHURON.SH
Ketua
2. DRS.SUFANDI
Wakil Ketua
3. DRS. MOH.SYAMSI
Sekretaris
4. MOH.RIFA'I.A.Md.Kep
Anggota
5. MOH.ISMAIL.S.PdI
Anggota
6. AH.HASAN.S.Pd
Anggota
7. FADLAN
Anggota
8. A.HADI
Anggota
9. MOH.YAZID
Anggota

**EVALUASI PROGRAM KERJA
PEMERINTAH DESA DUKUHTUNGGA TAHUN 2012**

NO	BIDANG	PROGRAM	KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	PEMERINTAHAN	a. Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengikuti Rapat Dinas di Kecamatan sesuai jadwal ➤ Mengikuti Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa sesuai jadwal ➤ Mengikuti Rapat Kerja di Kantor Desa setiap bulan ➤ Penataan sarana pelayanan Pemerintahan Desa ➤ Pengisian kekosongan Perangkat Desa 	
		b. Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan sosialisasi pentingnya identitas kependudukan ➤ Memfasilitasi Program E-KTP ➤ Menertibkan administrasi kependudukan ➤ Melaksanakan pemutahiran data kependudukan ➤ Melaporkan rekapitulasi kependudukan 	
		c. Produk Hukum Pemerintahan Desa	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menyusun dan menetapkan produk hukum Pemerintah Desa ➤ Melakukan regenerasi Kepengurusan Lembaga-lembaga Desa secara periodik dengan menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa 	
2	EKBANG	a. Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pendistribusian Pupuk kepada petani melalui Kelompok Tani ➤ Mendistribusikan Bantuan Benih padi kepada petani ➤ Normalisasi saluran irigasi ➤ Pembersihan enceng gondok di sepanjang sungan di wilayah desa Dukuhtunggal ➤ Pengadaan Hand Traktor melalui Bantuan Dinas Pertanian Dan Perkebunan Kabupaten Lamongan ➤ Pinjaman bergulir PUAP 	

		b. Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pembangunan Jembatan ➤ Rabat Jembatan Pertanian ➤ Pembangunan plengsengan 	
3	TRANTIB	a. Ketertiban Dan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penertiban Perijinan ➤ Penegakan Peraturan Desa dan perundang-undangan lainnya ➤ Memantau stabilitas keamanan dan melaporkan kejadian tindak kejahatan dan kriminalitas 	
4	KESRA	a. Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mengajukan dispensasi biaya pendidikan bagi keluarga tidak mampu 	
		b. Agama	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan kegiatan keagamaan ➤ Memberikan motivasi penataan sarana peribadatan 	
		c. Sosial	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan pembagian Raskin ➤ Melaksanakan verifikasi peserta JAMKESMAS ➤ Pelayanan JAMKESMAS non kuota ➤ Mengajukan pinjaman modal usaha kecil melalui Program SPP-PNPM –MP ➤ Melaksanakan program RTLH 	
		d. Kepemudaan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemberdayaan organisasi kepemudaan (Karang Taruna, Remaja Masjid) 	
		e. Pemberdayaan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan kegiatan bagi kaum perempuan melalui PKK 	
		f. Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melaksanakan kegiatan Posyandu ➤ Melaksanakan Imunisasi pada Balita ➤ Pembangunan got pembuangan air rumah tangga 	

Dukuhtunggal, 27 Februari 2013

Kepala Desa

ZAKARIYA

Lampiran Peraturan Desa Dukuhtunggal Kec Glagah

Kab. Lamongan

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal : 26/02/2013

Perihal : Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Dukuhtunggal

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA DUKUHTUNGGAL KECAMATAN GLAGAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN SEBELUMNYA (Rp.)	TAHUN BERJALAN (Rp.)	KET.
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1,1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa	46.000 000.00	46.000 000.00	
1.1.2.2	Tanah Bengkok	65.000 000.00	65.000 000.00	
1.1.2.3	Pasar Desa	2.450 000.00	2.450 000.00	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat			
1.1.3.1	Swadaya Masyarakat	90.000 000.00	30.000 000.00	
1.1.4	Hasil Gotong royong			
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong royong	15.000 000.00	10.000 000.00	
1.1.5	Hasil Leges dan Jasa Persaksian			
1.1.5.1	Hasil Leges dan jasa Surat menyurat	2.750 000.00	2.750 000.00	
1,2	Bagi hasil Pajak			
1.2.1	Bagi hasil Pajak Kabupaten/ Kota			
1.2.2	Bagi Hasil PBB	2.450 000.00	2.450 000.00	
1,3	Bagi Hasil Retribusi			
1,4	Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah			
1.4.1	ADD	41.500 000.00	41.500 000.00	
1.4.2	BANSUN (2 Dusun)	11.000 000.00	11.000 000.00	
1,5	Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten Kota dan Lainnya			
1.5.1.	Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat			
1.5.1.1	Pembangunan Rehab Gedung MI AL-ISHLAH		90.000 000.00	
1.5.1.2	Pembangunan Plengsengan sungai Dukuh		80.000 000.00	
1.5.1.3	Pembangunan Rehab Gedung MTs TARWA		90.000 000.00	
1.5.1.4	Pembangunan TPT	45.000 000.00	67.000 000.00	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
1.5.2.1	Pembangunan Jembatan Pertanian	75.000 000.00		
1.5.2.2	Pembangunan TPT		75.000 000.00	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten/kota			
1.5.3.1	TPAPD , KADES dan Perangkat Desa	52.800 000.00	52.800 000.00	
1.5.3.2	TPBPD	3.600 000.00	3.600 000.00	
1.5.3.3	Puma Bakti BPD		4.500 000.00	
1.5.3.4	Bantuan Dana Pembentukan BPD	500 000.00		
1.5.3.5	Bantuan Pelaksanaan E-KTP	1.000 000.00		
1.5.3.6	Bantuan Pembangunan Jembatan Poros		30.000 000.00	
1.5.3.7	Bantuan Pembangunan Jalan Dusun Dukuh		25.000 000.00	
1.5.3.8	Bantuan Pembangunan Jalan Dusun Pedurungan		40.000 000.00	
1,6	Hibah			
1.6.1	Hibah dari Pemerintah			
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi			
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten / Kota			
1,7	Sumbangan Pihak ke-3			
1.7.1	Sumbangan Masyarakat	266.650.000.00	170.000.000.00	
	JUMLAH PENDAPATAN	720.700 000.00	934.050.000.00	

2	BELANJA			
2,1	Belanja Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium KASUN Kepala Desa	27.500 000.00	27.500 000.00	
2.1.1.2	Honorarium KASUN (2 Orang)	12.000 000.00	12.000 000.00	
2.1.1.3	Honorarium KASI dan KAUR (5 Orang)	25.500 000.00	25.500 000.00	
2.1.2	Belanja Barang / jasa			
2.1.2.2	Belanja ATK dan Kebutuhan Kantor	6.500 000.00	8.500 000.00	
2.1.2.2	Belanja Bahan / Material			
2.1.3	Belanja Bahan / Material			
2.1.3	Belanja Bahan / Material			
2.1.3.1	Pembangunan Plengsengan Sungai Dukuh		90.000 000.00	
2.1.3.8	Pembangunan Jalan Dusun Pedurangan		40.000 000.00	
2.1.3.8	Pembangunan Jalan Dusun Dukuh		30.000 000.00	
2.1.3.10	Pembangunan TPA Dusun Dukuh		33.000 000.00	
2.1.3.12	Pembangunan Jembatan Pertanian	6.600 000.00		
2.1.3.14	Pembangunan TPT PNPM-MP	47.000 000.00		
2.1.3.16	Pembangunan Pagar Masjid Pedurangan	40.000 000.00		
2.1.2.4	Belanja Lain-lain			
2.1.2.4.2	Tunjangan SEKDES	2.000 000.00	2.000 000.00	
2.2	Belanja tidak langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai/ Penghasilan tetap			
2.2.1.2	Tunjangan Penghasilan tetap Kepala Desa	8.400 000.00	8.400 000.00	
2.2.1.3	Tunjangan penghasilan tetap Kepala Dusun, 2 Org	14.400 000.00	14.400 000.00	
2.2.1.4	Tunjangan Penghasilan tetap Kasi dan Kaur, 5 Org	30.000 000.00	30.000 000.00	
2.2.1.5	Tunjangan Penghasilan tetap BPD, 9 Org	3.600 000.00	3.600 000.00	
2.2.2	Belanja hibah			
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Bantuan untuk PKK	3.000 000.00	3.000 000.00	
2.2.3.2	Bantuan untuk POSYANDU	500 000.00	500 000.00	
2.2.3.3	Bantuan untuk KARTAR	1.000 000.00	1.000 000.00	
2.2.3.4	Bantuan untuk Irigasi		2.650.000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.3.6	Bantuan untuk PILGUB		2.000 000.00	
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.1.6	Tunjangan Purna Bakti BPD		4.500 000.00	
2.2.5.1	Pemeliharaan Kantor		2.000 000.00	
2.2.5.2	Biaya Rapat		6.500.000.00	
	JUMLAH BELANJA	599.350.000.00	847.700.000.00	
3	PEMBIAYAAN	720.700 000.00	934.050.000.00	
3.1	PENERIMAAN	720.700 000.00	934.050.000.00	
3.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya			
3.2	JUMLAH PEMBIAYAAN	720.700 000.00	934.050.000.00

Ditetapkan di Dukuhtunggal
Pada tanggal 26 Februari 2012
ZAKARIA